

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah proses multidimensial meliputi perubahan struktur sosial, sikap hidup masyarakat dan kelembagaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan (Korua, Rimate dan Siwu, 2016:411). Sedangkan menurut Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2013:11) pembangunan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu.

Menurut Efendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Sedangkan menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terjadi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun kehidupan alam.

Dari penjelasan para ahli diatas, menunjukkan bahwa pembangunan itu penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang perlu melakukan pembangunan di segala aspek baik sosial, ekonomi, politik dan aspek terkait lainnya. Di era orde baru, indonesia menerapkan pembangunan terpusat atau sentralisasi. Seiring dengan berjalannya waktu pembangunan tersebut malah semakin membuat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi. Untuk itu, setelah berakhirnya masa orde baru dibuat peraturan tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. kedua peraturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi. Kemudian, kedua peraturan tersebut direvisi kembali di tahun 2003.

Dengan adanya revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 Ke UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Ke UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan peraturan terkait kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan peraturan tersebut pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran serta pembangunan di wilayah masing-masing sesuai kebutuhan daerah. Untuk itu, daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Sartika, 2018:1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Untuk mengetahui perbandingan antara pendapatan dengan belanja daerah dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dengan laporan tersebut dapat diperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari beberapa komponen seperti, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut dapat dilakukan analisis belanja daerah.

Analisis belanja daerah perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan APBD telah ekonomis, efisien dan efektif atau sebaliknya. Analisis belanja daerah terdiri atas, analisis varian belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. Analisis varian belanja digunakan untuk melihat selisih antara anggaran dengan realisasi anggaran, apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada anggaran belanja menunjukkan efisiensi belanja, apabila realisasi anggaran lebih besar daripada anggaran belanja menunjukkan pemborosan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, analisis pertumbuhan belanja digunakan untuk melihat pertumbuhan belanja daerah dari waktu ke waktu, pada

umumnya pertumbuhan belanja setiap tahun cenderung naik. Untuk itu, pemerintah daerah harus bisa mengendalikan pertumbuhan belanja karena pertumbuhan belanja yang signifikan tanpa diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah (Mahmudi, 2019:158). Kemudian, analisis keserasian belanja digunakan untuk mengetahui keseimbangan belanja (Mahmudi, 2019:160). Yang ketiga adalah rasio efisiensi belanja yang digunakan untuk mengetahui perbandingan selisih antara realisasi belanja dan anggaran belanja serta mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah (Mahmudi, 2019:164).

Untuk itu, analisis belanja daerah ini juga perlu dilakukan pada tingkat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) setempat termasuk BAPPELITBANGDA. Hal itu dilakukan untuk mengetahui penggunaan anggaran yang dilakukan oleh OPD tersebut sudah efisien dan efektif atau sebaliknya boros dalam penggunaan anggaran. BAPPELITBANGDA adalah lembaga yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, perekonomian, dan penelitian dan pengembangan daerah. Dalam menjalankan kegiatan operasional dan belanja memerlukan anggaran. Anggaran tersebut berasal dari pemerintah daerah, untuk itu BAPPELITBANGDA harus membuat laporan keuangan setiap periode (tahun). Salah satu laporan yang harus dibuat oleh BAPPELITBANGDA adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), karena dengan laporan tersebut dapat dilihat anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja yang dilakukan selama satu periode (tahun).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut harus dibuat oleh seluruh BAPPELITBANGDA di Indonesia termasuk BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasaman Barat. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 5 Pasaman Baru, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari Dana APBD. Jika dilihat anggaran untuk BAPPELITBANGDA mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2018. Berikut adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BAPPELITBANGDA Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran BAPPELITBANGDA Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	8.305.588.994	6.298.991.501
2019	7.837.435.220	6.886.365.610
2020	5.679.106.734	5.328.000.347

Sumber: LRA BAPPELITBANGDA Tahun 2018-2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, Tahun 2018 tingkat serapan anggaran sebesar 75,84%, ke mudian di tahun 2019 naik menjadi 87,86% dan di tahun 2020 tingkat serapan anggaran naik menjadi 93,81%. Jika dilihat dari tingkat serapan anggaran, BAPPELITBANGDA kabupaten Pasaman Barat telah berhasil dalam melakukan pemanfaatan anggaran, karena anggaran belanja yang terealisasi tidak melebihi dana yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu dilakukan analisis belanja untuk mengetahui efisiensi

anggaran BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2020. Dari penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk membahas tentang “Analisis Kinerja Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Seberapa besar pertumbuhan belanja dari tahun 2018-2020?
2. Apakah penggunaan belanja selama tahun 2018 -2020 telah efisien?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perkembangan belanja BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 -2020;
2. Menganalisis kinerja belanja yang diukur dengan analisis varians, analisis pertumbuhan, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja BAPPELITBANGDA Tahun 2018 -2020.



1.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode yang dapat penulis jadikan sarana untuk mencari informasi yang berkaitan dengan judul pokok bahasan yang penulis jelaskan diatas, adapun metode yang akan penulis gunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan

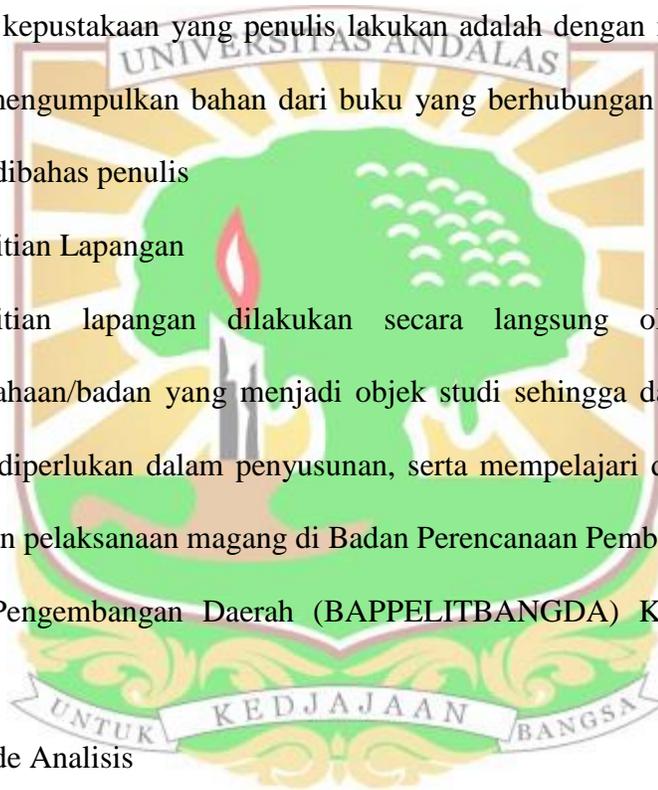
Studi kepastakaan yang penulis lakukan adalah dengan membaca, mencari, dan mengumpulkan bahan dari buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas penulis

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan/badan yang menjadi objek studi sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan, serta mempelajari data yang berkaitan dengan pelaksanaan magang di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasaman Barat.

3. Metode Analisis

Studi ini untuk menganalisis teori yang telah diterima dari perkuliahan dengan kenyataan di lapangan untuk mencari letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran



4. Pencarian data melalui internet

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan laporan magang ini, maka penulis membuat sistematika penulisan laporan sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penulis dalam memilih judul, perumusan masalah, tujuan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II

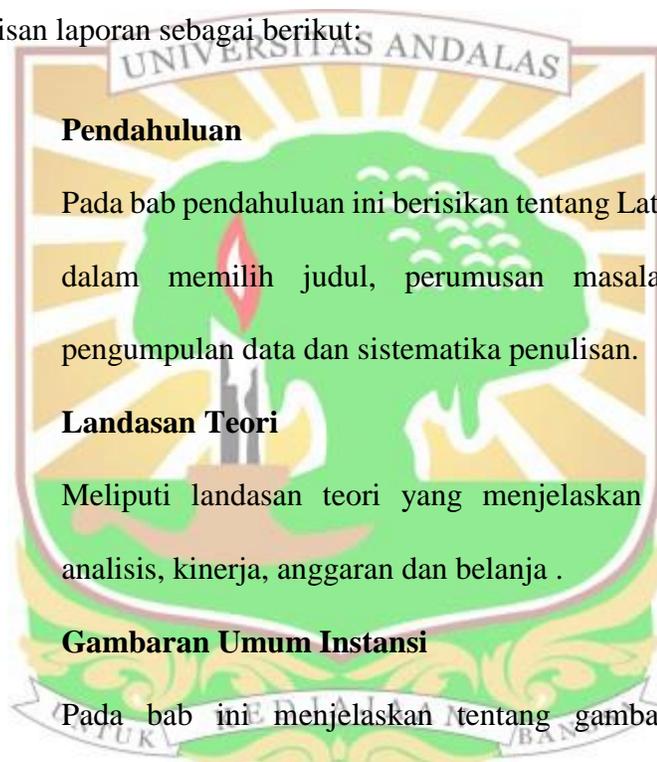
Landasan Teori

Meliputi landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian analisis, kinerja, anggaran dan belanja .

BAB III

Gambaran Umum Instansi

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) di Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari visi dan misi dan tugas pokok.



BAB IV Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang analisis kinerja belanja berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018-2020.

BAB V Penutup

Pada bab penutup ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas serta saran yang sesuai dengan hasil yang telah dibahas oleh penulis.

